

LAMPIRAN 4
 KEPUTUSAN DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO)
 NOMOR : KD 026/DIRUT/0524
 TANGGAL : 20 Mei 2024

**LEMBAR UJI KONSEKUENSI
 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

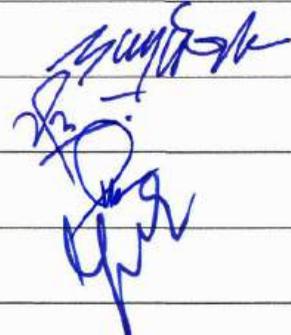
Pada hari Jumat, tanggal 17 Mei Tahun 2024 bertempat di Kantor Pusat PT Pos Indonesia (Persero) telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Akta Perusahaan Data Pribadi Direksi dan Komisaris (tanggal lahir, alamat, no KTP)	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 2 UU Nomor 30 tahun 2000		Karena kalau sudah <i>terpublish</i> , informasi tersebut akan sulit dikendalikan jika para Direksi dan Komisaris sudah pensiun, sehingga di indikasikan dapat mengganggu kehidupan pribadi yang bersangkutan.	Seijin yang bersangkutan
2.	Dokumen Perjanjian Kerja Sama dengan mitra	Pasal 17 Huruf b UU Nomor 14 Tahun 2008		a. Informasi pihak ketiga yang dapat mengganggu persaingan usaha tidak sehat	Seijin yang bersangkutan
	a. Informasi Pihak Ketiga			b. Termasuk ke dalam Rahasia Dagang menyangkut Hak Intelektual Perusahaan	Selamanya
	b. Metode pencapaian target	Pasal 17 Huruf b UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 2 UU Nomor 30 tahun 2000		c. Tertera di dalam NDA PKS	Selamanya
	c. Perjanjian Kerja Sama yang memiliki klausul Kesepakatan untuk	Pasal 17 huruf j Nomor 14 tahun 2008 Perjanjian Kerahasiaan (NDA) antara kedua belah			

	merahasiakan isi Perjanjian Kerja Sama	pihak			
3.	Data Kasus Perusahaan	Pasal 2 UU Nomor 30 tahun 2000 Pasal 17 huruf a Nomor 14 tahun 2008		Rahasia dagang Karena pada dasarnya, dalam suatu kasus/perkara hukum, berkaitan dengan seluruh informasi penting/rahasia atau data-data informan, saksi-saksi, pelapor, dan/atau korban (karyawan/Direksi) yang apabila <i>terpublish</i> dapat mengakibatkan terganggunya kehidupan pribadi yang bersangkutan	Selamanya
4.	Surat Masuk dan Surat Keluar Internal dan Eksternal a. Yang bersifat rahasia	Pasal 17 huruf j Nomor 14 tahun 2008		Karena ditetapkan sifat surat rahasia oleh pejabat tertentu	Aturan Masa Retensi Arsip UU no 43
5.	Data Pribadi Pegawai	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 tahun 2008		Karena informasi pribadi pegawai merupakan hak dasar pegawai yang bersangkutan	Seijin yang bersangkutan
6.	SK Pensiun a. Besaran Gaji Dasar	Pasal 17 huruf h uu Nomor 14 tahun 2008		Karena informasi pribadi pegawai merupakan hak dasar pegawai yang bersangkutan	Seijin yang bersangkutan
7.	Lampiran Pengadaan a. <i>Term of Reference</i> b. <i>Rincian Engineer Estimate</i>	Pasal 17 Huruf b UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 2 UU Nomor 30 tahun 2000 Pasal 17 Huruf b UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 2 UU Nomor 30 tahun 2000		a. Termasuk ke dalam Rahasia Dagang menyangkut Hak Intelektual Perusahaan b. Jika dibuka akan terjadi Persaingan usaha tidak sehat	Sampai pekerjaan selesai Sampai pekerjaan selesai
8.	Berita Acara <i>Aawnijzing</i> dan RKS (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat)	Pasal 17 Huruf b UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 2 UU Nomor 30 tahun 2000		Termasuk ke dalam Rahasia Dagang menyangkut Hak Intelektual Perusahaan	Sampai pekerjaan selesai

9.	Berkas Administrasi dan Teknis Pemenang Pengadaan	Pasal 17 Huruf b UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 2 UU Nomor 30 tahun 2000		Persaingan usaha tidak sehat	Seijin yang bersangkutan
10.	Berita Acara E- <i>Auction</i> , Surat Penawaran Harga, dan Jaminan Penawaran	Pasal 17 Huruf b UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 2 UU Nomor 30 tahun 2000		Persaingan usaha tidak sehat	Sampai pekerjaan selesai
11.	Pengumuman Pemenang Pengadaan a. NPWP b. Alamat	Pasal 17 Huruf b UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 2 UU Nomor 30 tahun 2000		Persaingan usaha tidak sehat	Seijin yang bersangkutan
12.	Penunjukan Pelaksana a. NPWP b. Alamat	Pasal 17 Huruf b UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 2 UU Nomor 30 tahun 2000		Persaingan usaha tidak sehat	Seijin yang bersangkutan
13.	Kesanggupan Harga	Pasal 17 Huruf b UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 2 UU Nomor 30 tahun 2000		Persaingan usaha tidak sehat	Sampai pekerjaan selesai
14.	Laporan Pengadaan a. Informasi dan Data pihak ketiga	Pasal 17 Huruf b UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 2 UU Nomor 30 tahun 2000		Persaingan usaha tidak sehat	Seijin yang bersangkutan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	TTD
1	Tata Sugiarta	Corporate Secretary	
2	Heri Nugrahanto	VP Corporate Communication	
3	Mujiyono	VP Legal	
4	M Iqbal Wiradikara	VP General Support	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 20 Mei 2024

A.N. DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO)
DIREKTUR UTAMA




FAIZAL ROCHMAD DJOEMADI